

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Preferensi Masyarakat Terhadap Sekolah

Preferensi berasal dari kata *preference* (Inggris) yang artinya ‘lebih suka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), preferensi diterjemahkan sebagai kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. Menurut Porteus (dalam Saputra, 2000:10), Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah *perception* (Persepsi), *attitude* (sikap), *value* (nilai), *preference* (Kecenderungan), dan *satisfaction* (kepuasan). Komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.

Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya. Simamora (2004:87) mengungkapkan bahwa preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh 2 hal, yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun. Bila dikaitkan dalam preferensi terhadap sekolah, pengalaman yang diperoleh akan lebih dirasakan oleh orang tua. Sehingga orang tua tentu memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sekolah yang tepat untuk anaknya. Dan untuk kepercayaan turun temurun lebih dikaitkan dengan keluarga dan lingkungan yang ada disekitar peserta didik.

Menurut Gibson dalam Walgito (dalam Maryati 2009:24) persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengandemikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek/fenomena tertentu. Persepsi berkaitan pula dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang suatu fenomena pada saat tertentu dan mencakup pula pada aspek kognitif/pengetahuan. Jadi persepsi mencakup penafsiran objek/tanda dari sudut pandang individu yang bersangkutan dan persepsi dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan

sikap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persepsi sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: faktor situasi, kebutuhan dan keinginan juga keadaan emosi. Pada dasarnya perilaku seseorang atau apa yang dilakukan seseorang selalu bersumber dari persepsinya terhadap sesuatu dalam menilai diri dan lingkungannya. Perilaku bermula dari penginderaan yang ditafsirkan, kemudian muncul perasaan/ emosi yang menimbulkan harapan dan akhirnya menghasilkan tindakan.

Seorang pakar dalam bidang marketing menyatakan persepsi sebagai proses seorang individu memilih informasi, mengorganisir, menafsirkan masukan-masukan info untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang dunia (Kotler dalam Maryati, 2009 : 25). Pakar lain dalam bidang psikologi menyatakan persepsi sebagai proses pengorganisasian dan penginterpretasian informasi dari organ-organ indera (Malcom Hardy dalam Maryati, 2009 : 25). Sementara untuk maksud yang sama pakar psikologi lain, Mahmud Dimiyati (dalam Maryati, 2009:25) menyatakan persepsi sebagai proses penafsiran stimulus yang tidak ada dalam otak.

Persepsi dinyatakan sebagai proses menafsirkan sensasi-sensasi dan memberikan arti kepada stimuli. Persepsi merupakan penafsiran realitas dan masing-masing orang memandang dari sudut perspektif yang berbeda (Winardi, 1991). Sedangkan Winarto (1998) menyatakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Dari berbagai konsep tentang persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses perjalanan sejak dikenalnya suatu objek melalui organ-organ indera sampai diperolehnya gambaran yang jelas dan dapat dimengerti serta diterimanya objek tersebut.

Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Petty, cocopio,

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1986 dalam Azwar S (2000 : 6), Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isu. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu.

Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dapat diartikan juga sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Sikap relatif lebih menetap atau jarang mengalami perubahan. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu:

1. komponen kognitif sikap (merupakan segmen pendapat atau keyakinan dari sikap),
2. komponen afektif sikap (segmen emosional atau perasaan dari sikap) dan
3. komponen perilaku sikap, (merupakan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu).

Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengembang gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Nilai mempunyai atribut intensitas. Atribut intensitas mengatakannya bahwa bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaannya adalah penting. Atribut intensitas menjelaskan seberapa penting nilai itu. Ketika kita memperingatkan nilai-nilai individu berdasarkan intensitasnya, kita peroleh sistem nilai orang tersebut. Secara umum dapat dikatakan nilai itu relatif stabil dan kokoh. Nilai sebagai modal tingkah laku atau cara bertindak secara eksplisit maupun implisit melibatkan fungsi aktualisasi diri.

Fungsi pengetahuan berarti pencarian arti kebutuhan untuk mengerti,

kecenderungan terhadap kesatuan persepsi dan keyakinan yang lebih baik untuk melengkapi kejelasan dan konsepsi.

Kepuasan atau *satisfaction* umumnya dipakai dalam bidang ekonomi terkhusus dalam kegiatan jual beli dan jasa. Kata kepuasan atau *satisfaction* berasal dari bahasa Latin “satis” yang berarti cukup baik, memadai dan *facio* yang berarti melakukan atau membuat. Menurut pakar pemasaran Kotler dan Keller (2009), menandakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja berada di atas persepsi konsumen, maka konsumen akan sangat puas dan demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada berada di bawah persepsi konsumen, maka konsumen akan kecewa. Hal tersebut ditambahkan kembali oleh Kotler dan Keller (2009) yaitu konsumen yang sangat puas biasanya akan tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk yang lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. Namun sebaliknya apabila konsumen kecewa dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan yaitu menurunkan jumlah konsumen karena konsumen tidak tertarik lagi untuk menggunakan jasa maupun produk suatu perusahaan sehingga akan berdampak pada penurunan laba.

Zeithmal dan Bitner (2003) mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa puas apabila hasil mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetap menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen.
4. Faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang dialami oleh konsumen.
5. Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang mencakup kebutuhan pribadi.

Berdasarkan penjelasan setiap komponen-komponen tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan dan pengaruh dalam setiap komponennya. Persepsi pada umumnya dipengaruhi oleh nilai dan tentunya persepsi akan sangat berpengaruh dalam penentuan kecenderungan, kepuasan dan sikap seseorang. Komponen sikap dipengaruhi oleh persepsi dan nilai serta sangat mempengaruhi preferensi dan kepuasan seseorang. Komponen kepuasan dipengaruhi oleh nilai, persepsi, sikap dan preferensi, namun pada akhirnya kepuasan seseorang akan sebuah objek akan mempengaruhi pandangan individu lainnya atau dapat dikatakan mendorong seseorang untuk memilih objek tersebut.

Sedangkan untuk komponen preferensi atau kecenderungan dipengaruhi oleh nilai, sikap serta persepsi. Artinya kecenderungan akan ada setelah individu memiliki persepsi sendiri, nilai dan juga sikap terhadap objek yang akan dipilihnya. Preferensi sendiri akan mempengaruhi bagaimana kepuasan dari objek yang telah dipilih nantinya. Selain itu preferensi juga dipengaruhi faktor lainnya yaitu motivasi atau dorongan dari lingkungan sekitar. Motivasi berasal dari kata Latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Bernard Berendoom dan Gary A Stainer dalam Sedarmayanti (dalam Maryati 2009:25), mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan. Sedangkan motivasi diri menurut Hidayat (dalam Maryati, 2009:25) adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan atas perbuatan

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut. Motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Kata butuh, ingin, hasrat dan penggerak semua sama dengan motive yang asalnya dari kata motivasi. Menurut Nawawi (2001), bahwa kata motivasi (*motivation*) kata dasarnya adalah motif (*motive*) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadikan sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Dari setiap penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap komponen-komponen penentu keputusan individu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu individu tentu memerlukan pendapat atau dorongan individu lainnya untuk memutuskan suatu pilihan.

Maryati (2009:27) mengungkapkan bahwa preferensi bersekolah adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk bersekolah atau tidak bersekolah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu kondisi sekolah, lokasi sekolah dan sosial ekonomi orang tua. Dan dijelaskan lagi oleh Maryati bahwa preferensi masyarakat terhadap sekolah terbentuk melalui 2 tahap yaitu kesukaan dan pemilihan sekolah.

1. Kesukaan yang dimaksud adalah pengelompokan sekolah-sekolah yang menjadi favorit atau kesukaan dari peserta didik ataupun orang tua.
2. Pemilihan sekolah lebih mengarah pada penetapan atau keputusan dari pengelompokan sekolah favorit yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan hal tersebut tentunya akan dikaitkan dengan faktor-faktor yang berpengaruh.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa kedua tahap preferensi tersebut sesuai dengan 3 komponen penentu keputusan seseorang dalam memilih sesuatu yaitu nilai, sikap dan juga persepsi.

Menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2007:22), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Ditambahkan kembali oleh Soekanto (2007:21), agak sukar untuk menentukan memberikan suatu batasan tentang masyarakat karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup pebagai faktor sehingga kalaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa para ahli diatas, Preferensi masyarakat dapat diartikan pilihan dan kesukaan dari kumpulan manusia pada suatu daerah terhadap hal-hal tertentu, baik berkaitan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan juga pendidikan.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dijelaskan bahwa Masyarakat adalah Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan element yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, terkhusus menyangkut sekolah.

Ihsan (2011 : 110-111) menyebutkan bahwa pengaruh dan peran masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai arah dalam menentukan tujuan.
- b. Sebagai masuk dalam menentukan proses belajar mengajar.
- c. Sebagai sumber belajar
- d. Sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya
- e. Sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah.

Sedangkan Hasbullah

(2012:124) menyebutkan bahwa peran masyarakat terhadap sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan sert dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
- b. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantudan mendukung cita-citadankebutuhan masyarakat.

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, perpustakaan, AULA dll.
- d. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Sekolah bisa melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian khusus seperti petani, pedagang, polisi, dokter dll.
- e. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. selain buku-buku pelajaran, masyarakat juga memberikan bahan pelajaran yang banyak sekali seperti industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan dll.

Peran lain dari Masyarakat adalah sebagai peserta didik sendiri. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

B. Sekolah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran. Selama di sekolah, peserta didik mendapatkan pengajaran, bimbingan dan pendidikan yang dilakukan oleh para tenaga pendidik.

Sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang ada di Indonesia. Terdapat 2 jenjang yang dapat ditempuh dalam dunia sekolah, yaitu:

1. Pendidikan Dasar

Dalam UU no.20 tahun 2003 pasal 17 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Sekolah Menengah

Dalam UU no.20 tahun 2003 pasal 18 dijelaskan pula bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Dan untuk pengkategorian pendidikan dasar dan menengah menurut UU no.20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 antara lain:

1. Sekolah Formal Standar (sekolah potensial/rintisan)

Yaitu kategori sekolah yang masih relatif lebu banyak kelemahan atau kekurangan untuk memnugi kriteria sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Lebih jelas lagi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 11 ayat 2 dan 3 bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah yang belum memenuhi (masih jauh) dari standar nasional pendidikan.

2. Sekolah Formal Mandiri (sekolah standar nasional)

Yaitu kategori sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.

3. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Yaitu kategori sekolah yang sudah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu atau setara dengan negara maju.

Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tentu pengelolaan sekolah juga haruslah baik, dan dalam pengelolaan suatu sekolah, harus terdapat sebuah standarisasi yang benar. Standarisasi yang telah ditetapkan bagi pendidikan di Indonesia merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi

lembaga atau sekolah untuk menjadi sekolah yang baik. Semua standar

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut sudah teruang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa standar nasional meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

1. Standar Isi

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 5 dijelaskan bahwa Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu.

Standar isi juga memuat tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan atau akademik.

a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Dijelaskan pada Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 6 , kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Kelompok mata pelajaran estetika;
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Dan pada pasal 8 kemudian dijelaskan lagi bahwa kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan kompetensi yang

dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar (tertuang dalam setiap silabus dan RPP pendidik).

b. Beban Belajar

Beban belajar untuk SMA sebagaimana dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 10 menggunakan jam pembelajaran setiap minggu dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 16 menjelaskan bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah (SMA) berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dan kemudian, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17, bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah (SMA) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SMA.

Dan ditengah kemajuan pendidikan hingga saat ini, kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Kurikulum 2013. Dijelaskan pada situs Kementrian Pendidikan dan Budaya (2012) bahwa implementasi Kurikulum 2013 masih dilaksanakan secara bertahap.

Terdapat setidaknya 3 persiapan yang harus dijalankan untuk implementasi kurikulum ini, antara lain :

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Berkait dengan buku induk untuk pegangan guru dan murid. Hal ini dikarenakan bila kurikulum mengalami perbaikan, maka kedua buku tersebut haruslah diperbaharui sesuai kurikulum yang ada.
2. Pelatihan guru. Dikarenakan implementasi kurikulum masih dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru-guru pun akan dilakukan secara bertahap.
3. Dan yang terakhir adalah tata kelola. Kementrian sudah memikirkan tentang tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Maka dengan begitu pula, tata kelola untuk kurikulum pun akan berubah, contohnya, untuk administrasi buku raport siswa. Karena terdapat 4 standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah pula.

d. Kalender Pendidikan atau Akademik

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 18 , dijelaskan bahwa kalender pendidikan atau akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur (berbentuk jeda tengah semester selama-lamanua satu minggu dan jeda antar semester).

2. Standar Proses

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakrsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dan pada pasal 19 dijelaskan bahwa setiap sekolah atau satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 25, dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau sekolah. Sebagaimana dijelaskan pula bahwa standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Dan kompetensi lulusan haruslah mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Pada pasal 26 ayat 2 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan untuk sekolah menengah atas adalah bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 dijelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk kualifikasi pendidik SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dijelaskan pula bahwa Tenaga kependidikan pada tingkat Sekolah menengah atas sekurang-kurang terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah.

5. Sarana dan Prasarana

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 42 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan atau sekolah diharuskan memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dan untuk prasarana, dijelaskan bahwa sekolah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah), ruang pendidik (guru), ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dan dijelaskan pula lebih lanjut dalam Permendiknas No.24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA) dijelaskan bahwa sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) harus memiliki :

1. Ruang Kelas
2. Ruang Perpustakaan
3. Ruang laboratorium biologi
4. Ruang laboratorium fisika
5. Ruang laboratorium kimia
6. Ruang laboratorium komputer
7. Ruang laboratorium bahasa

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8. Ruang pimpinan
9. Ruang guru
10. Ruang tata usaha
11. Tempat beribadah
12. Ruang konseling
13. Ruang UKS
14. Ruang organisasi kesiswaan
15. Jemban
16. Gudang
17. Ruang sirkulasi
18. Tempat bermain/olahraga

6. Standar Pengelolaan

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 49, dijelaskan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Dan pada setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan. Dan pada satuan pendidikan SMA/MA sederajat melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana serta kesiswaan.

7. Standar Pembiayaan

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 62 dijelaskan pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi yang dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.

Biaya operasi mencakup tentang gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung.

Biaya personal yang dimaksud meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 63 dijelaskan pula bahwa penilaian pendidikan ada satuan pendidikan menengah terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

C. Lokasi Sekolah

Sumaatmadja (dalam Riswandi, 2009:10) menjelaskan bahwa lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan dan memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.

Menurut Djojodipuro (dalam Maryati, 2009:41) , teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.

1. Aksesibilitas

Keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak tetapi juga tergantung pada dasar dan prasarana penunjang.

Menurut Black dalam Tamin (dalam Maryati, 2009:37), Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dapat diartikan juga suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan

berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi .

Menurut Tarigan (dalam Syahrizal, 2010:8), Aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

2. Waktu dan Jarak Tempuh Perjalanan

Menurut Tamin (dalam Maryati, 2009:40), Waktu dan jarak yang dibutuhkan dalam menempuh perjalanan sangat bervariasi, dan hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas. Berikut ini merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan di Amerika dilihat dari tingkat aksesibilitas menurut waktu yang wajar atau standar waktu yang dianggap sebagai perjalanan yang masih nyaman, dan jika melebihi waktu tersebut dinyatakan perjalanan tidak nyaman. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Pergerakan Waktu Terhadap Perjalanan

Pergerakan	Waktu Pergerakan	Keterangan	Waktu tempuh berkendara (menit) dengan jumlah penduduk (dalam ribuan)		
			<200	200-1000	>1000
Bekerja	Pagi, Jam Puncak. Sore	Rata-rata waktu perjalanan ke tempat kerja	40	45	60
Berbelanja	Siang hari	Pusat Perbelanjaan Regional	45	45	45
		Pusat Perbelanjaan Lokal	30	30	30
Aktifitas Kesehatan	Sepanjang hari	Rumah Sakit Umum	40	45	60

Daniel Kasidi, 2014

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		Pelayanan Kesehatan Lokal	30	30	30
Aktifitas Sosial	Siang hari	Pelayanan Sosial	30	30	45
Pendidikan	Sepanjang hari	Dari sekolah yang terdekat	40	45	45
Pusat Kota	Sepanjang hari	Waktu menuju pusat kota	40	45	45

Sumber : Tamin (dalam Maryati, 2009:40)

Bila melihat data pada tabel diatas dan dikaitkan dengan kondisi dari kota Bandung saat ini, pada umumnya seorang peserta didik yang memakai kendaraan dapat menempuh sekolahnya dalam waktu 45 menit. Dan bila waktu yang ditempuh lebih dari 45 menit, maka dapat dikatakan perjalanan tidak nyaman.

Dalam analisis kota atau rencana kota menurut Jayadinata (dalam Syahrizal, 2010:8), dikenal standar lokasi (*standard for location requirement*) atau standar jarak. Standar jarak atau lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Standar Jarak dalam Kota

No	Prasarana	Jarak dari Tempat Tinggal (Berjalan Kaki)
1	Pusat Tempat Kerja	20 menit s.d 30 menit
2	Pusat Kota (Pasar dan sebagainya)	30 menit s.d 45 menit
3	Pasar Lokal	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
4	Sekolah Dasar (SD)	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 $\frac{1}{2}$ km atau 20 menit
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20 atau 30 menit
7	Tempat Bermain Anak atau Taman	$\frac{3}{4}$ km atau 20 menit
8	Tempat Olahraga (Rekreasi)	1 $\frac{1}{2}$ km atau 20 menit
9	Taman Umum (Cagar, Kebun Binatang, dsb)	30 sampai 60 menit

Sumber : Jayadinata (dalam Syahrizal, 2010:8)

Berdasarkan data pada tabel diatas ini, dapat dilihat bahwa peserta didik sekolah menengah atas yang berjalan kaki dari tempat

kediamannya menuju sekolah harus menempuh waktu selama 20-30 menit. Peserta didik akan mengalami beberapa resiko bila jarak dari tempat kediamannya menuju sekolah lebih dari standar waktu tersebut, seperti harus bangun lebih awal dari yang lainnya untuk berangkat sekolah, menguras stamina lebih banyak dikarenakan jarak yang jauh, dan lain-lain. Dan dari beberapa resiko tersebut, memungkinkan berdampak pada proses belajar peserta didik nantinya.

D. Sosial Ekonomi Orang Tua

Menurut Maryati (2009:27), kondisi sosial ekonomi masyarakat (siswa) meliputi tingkat pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, struktur keluarga, dan ketersediaan fasilitas pendidikan di rumah, termasuk buku-buku dan komputer. Kondisi sosial ekonomi sekolah diukur oleh kualitas infrastruktur sekolah, seperti ketersediaan alat-alat penunjang proses pembelajaran, kondisi gedung sekolah, kualifikasi guru, ketersediaan komputer, dan perangkat lunak penunjang proses pembelajaran, rasio guru dan murid, waktu yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, disiplin, dan rasa aman di sekolah, serta dukungan orangtua terhadap sekolah.

Menurut Willms (2006) dari UNESCO *Institute for Statistics*, faktor sosial ekonomi amat dominan dalam menentukan keberhasilan siswa, meski bukan satusatunya. Secara umum, kemampuan membaca siswa di negara-negara yang tergabung dalam *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang berpendapatan tinggi lebih baik ketimbang di negara-negara non- OECD, yang mayoritas berpendapatan rendah, kecuali Singapura dan Hongkong. Ditunjukkan pula, kesenjangan prestasi siswa di negara-negara non-OECD lebih lebar ketimbang di negara-negara OECD. Bahkan, prestasi siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah masih tertinggal dibanding siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi yang tinggal di negara-negara makmur.

Kondisi sosial ekonomi sekolah juga berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam membaca, di luar kontribusi faktor sosial ekonomi siswa. Secara

umum, siswa akan memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi bila sekolah mereka memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik. Sebaliknya, mereka cenderung berprestasi lebih rendah dari yang semestinya, bila sekolah memiliki kondisi sosial ekonomi lebih lemah.

Dalam hal ini, kelompok yang paling dirugikan adalah siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang belajar di sekolah-sekolah yang memprihatinkan. Orangtua mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk mengompensasi rendahnya mutu pendidikan yang diterima anak-anak mereka di sekolah.

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Susilowati (dalam Maryati, 2009:28) menyatakan semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Pendidikan masyarakat yang rendah menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, dimana akan sangat merugikan secara individu maupun negara, karena hal tersebut dapat merupakan suatu pemborosan dana dan daya yang berakibat pada tingkat produktivitas yang dihasilkan.

Kemudian Susilowati menambahkan perlu disadari bahwa pendidikan erat kaitannya dengan tingkat penghasilan keluarga, uang pendidikan, fasilitas pendidikan dan faktor lain yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam program pembangunan ekonominya.

2. Pendapatan Orang tua.

Maryati (2009 : 30) menyatakan bahwa Faktor pendapatan masyarakat seringkali berpengaruh dalam penentuan suatu kebutuhan untuk hidup, termasuk dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat maka biasanya semakin tinggi pula tingkat pendidikannya. Seringkali yang menjadi permasalahan adalah ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah atau sering dikenal dengan istilah miskin. Upaya untuk mengatasi

masalah pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat perlu dilakukan identifikasi mengenai pembagian kategori jenjang pendapatan.

E. Hipotesis

Widi (dalam Sari, 2012:39) menjelaskan, hipotesis merupakan penjelasan atau pernyataan yang disarankan tentang suatu fenomena, atau suatu usulan penjelasan yang berasal tentang kemungkinan adanya hubungan antar fenomena.

Menurut Arikunto (2010 : 112-113), hipotesis terbagi atas 2 jenis yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja (H_a) menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel x terhadap variabel y.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a (Hipotesis Kerja) :

1. Ada hubungan yang signifikan antara kondisi sekolah dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.
2. Ada hubungan yang signifikan antara lokasi dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.
3. Ada hubungan yang signifikan antara sosial ekonomi orang tua dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.

H_0 (Hipotesis nol) :

1. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kondisi sekolah dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.

2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara lokasi dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sosial ekonomi orang tua dengan preferensi masyarakat terhadap sekolah menengah atas negeri (SMAN) di kota Bandung.